

Kota dan Jejak Aktivitas Peradaban

ARYA W. WIRAYUDA, S.Hum., M.A. (ed.)

*Departemen Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Airlangga*



Airlangga
University
Press

■ Pusat Penerbitan dan Percetakan
Universitas Airlangga

DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Gambar	xiv
Daftar Tabel	xv

BAGIAN I

AIR, TANAH, DAN PERKEMBANGAN KOTA

1. Sungai Brantas dan Perkembangan Kota Malang	2
<i>Sarkawi B. Husain</i>	
2. Program Legalisasi Aset dan Tanah Surat Ijo di Surabaya	27
<i>Sukaryanto</i>	

BAGIAN II

POLITIK DAN KOMUNITAS PERKOTAAN

3. Perubahan dan Kelangsungan Komunitas Bajau di Wakatobi Sulawesi Tenggara	42
<i>La Ode Rabani</i>	
4. Komunitas Tionghoa Peranakan Surabaya Pada Masa Kolonial Jepang	56
<i>Shinta Devi Ika Santhi Rahayu</i>	
5. Hegemoni dan Intervensi Negara dalam Penulisan Sejarah Komunitas Etnis Cina pada Masa Orde Baru	72
<i>Muryadi</i>	
6. Komunitas Yahudi Surabaya dalam Kodikologi dan Rekaman Manuskrip Ibrani	87
<i>Moch Ali</i>	

BAGIAN III**KAMPUNG DAN KEHIDUPAN PERKOTAAN**

7. Aktivitas Perbankan di Kota Surabaya Masa Kolonial.....	110
<i>Ikhsan Rosyid Mujahidul Anwari</i>	
8. Krisis Ekonomi di Kota Surabaya 1998	137
<i>Purnawan Basundoro</i>	
9. Kampung dan Solidaritas Sosial Masyarakat Kampung: Surabaya pada Paruh Pertama Abad XX	170
<i>Samidi</i>	
10. Merebut Identitas Anak: Praktik Budaya dan Islam di Kota Surabaya pada Masa Pasca Kolonial.....	193
<i>Arya W. Wirayuda</i>	
11. Gerakan Teosofi dan Pengaruhnya terhadap Kaum Priyayi Nasionalis Jawa 1912–1926.....	209
<i>Pradipto Niwandhono</i>	
12. Dari <i>Kampungverbetering</i> ke <i>Kampung Improvement Program</i> Program Perbaikan Kampung di Surabaya di Masa Kolonial dan Pasca Kemerdekaan	227
<i>Adrian Perkasa</i>	
13. Membangun Perekonomian di Perbatasan: Aktivitas Pasar di Perbatasan Indonesia-Timor Leste	253
<i>Eni Sugiarti</i>	
INDEKS	273



9

KAMPUNG DAN SOLIDARITAS SOSIAL MASYARAKAT KAMPUNG: SURABAYA PADA PARUH PERTAMA ABAD XX

Oleh:
Samidi¹

Transformasi Kota Surabaya terjadi pada akhir abad ke-19 yang ditandai adanya perubahan basis ekonomi secara gradual dari agraris ke industri. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya terkait dengan perkembangan industri, tetapi juga dengan adanya berbagai fasilitas, seperti transportasi, komunikasi, permukiman, fasilitas belanja, dan hiburan kota sebagai penegasan simbol modernitas. Pembangunan jalur transportasi kereta api dari Surabaya–Pasuruan dan Malang beroperasi sejak tahun 1875. Sejak saat itu, peran alat transportasi yang digerakkan binatang, seperti pedati, cikar, dan gerobak, secara berangsur-angsur berkurang. Demikian juga dengan hadirnya sepeda, sepeda motor, dan mobil menambah keragaman transportasi. Alat transportasi utama pada abad ke-19 adalah kereta kuda (dokar, delman, andong, sado, kossong) mulai tersaingi oleh alat transportasi mesin. Pembangunan permukiman dan fasilitas belanja modern yang muncul pada dekade awal abad ke-20 juga penanda modernitas bagi perkembangan kota.² Realitas modernitas dan kemajuan Kota Surabaya pada awal abad ke-20 dapat ditunjukkan pada kutipan berikut.

Ta'adjoebilah saja memandang ka'adaan dalem negri ini, beloemlah pernah saia melihat, loeroeng dan djalan dan roemah-roemah orang boemipoetra, istimewa poela roemah orang koelit poetih, dan toko semoewanja diperboeat dari pada batoe belaka, djika orang-orang koerang pande berdjalan-djalan di kota ini ta'bolih tida temtoelah sesat

¹Dosen Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unair.

²Samidi. 2017. "Surabaya sebagai Kota Kolonial Modern pada Akhir Abad ke-19: Industri, Transportasi, Permukiman, dan Kemajemukan Masyarakat," dalam *Mozaik Humaniora*, Vol. 17(1), hlm. 157–180.

*badannja ta'tahoe menoeedjoe, sebab loeroeng dan djalan simpang menjimpang. Lain poela djalan spoor dan tram jang senantiasa moendarmandir tida brentinja, apakah lagi dogkar dan kreta rioeh rendah boenjinja lagiken toeli mendengarnja dan orang-orang sesek penoeh siang hari dan malem tida berkapoatoesan.*³

Catatan kesaksian itu menginformasikan tentang beberapa fasilitas modern kota. Status kota modern tentu tidak terjadi secara mendadak, tetapi melalui proses panjang. Pada abad ke-17 dan ke-18, kongsi dagang Belanda yang disebut *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC) telah melakukan transaksi ekonomi di Surabaya, bahkan mampu membangun benteng dan tembok pertahanan untuk perlindungan. Eksistensi ekonomi yang dikendalikan VOC semakin menguat pada saat Surabaya secara yuridis telah diserahkan pada tahun 1743. Ketika penerapan kebijakan Tanam Paksa (1830–1870), Surabaya memegang peran sebagai sentra produksi dan distribusi gula. Berbagai fasilitas pendukung industri gula dibangun, terutama terkait gudang dan bengkel perawatan mesin. Memasuki awal abad ke-20 sampai bergulir pada beberapa dekade berikutnya, H. W. Dick menyebut Surabaya sebagai *city of work*.⁴

Berbagai fasilitas yang terdapat di Surabaya menegaskan status kota modern, tetapi karakteristik sosial budaya masyarakat yang direpresentasikan di kampung-kampung tidak serta merta ikut berubah. Penetapan beberapa kota di Hindia Belanda dengan status *gemeente* rupanya juga tidak memiliki banyak arti pada kondisi fisik kampung selama masa kolonial. Sehubungan dengan hal ini, tulisan ini tidak bermaksud untuk menjelaskan mengenai kemajuan dan simbol kota, tetapi aspek yang menarik dijelaskan lebih lanjut adalah fisik kampung secara umum dan penguatan solidaritas sosial penduduk kampung pada awal dan pertengahan abad ke-20. Kampung pada masa kolonial merupakan kondisi ironis di tengah-tengah kemajuan kota, sedangkan penjelasan atas solidaritas sosial masyarakat kampung ditujukan untuk menunjukkan ciri utama masyarakat Surabaya yang egaliter. Egalitarianisme

³ Pernyataan itu dikutip dari kesaksian orang dari Samarinda yang berkunjung ke Surabaya pada Desember 1903. Artikel yang mengungkapkan pengalaman dan kesaksian dimuat di koran *Bintang Soerabaia*, 17 Februari 1904.

⁴ H. W. Dick. 2002. *Surabaya: City of Work, A Socioeconomic History, 1900–2000*. Athens: Ohio University Press.

(dari bahasa Perancis *ègal* artinya sama) merupakan karakteristik yang melekat dalam diri *Arek* Surabaya sebagai masyarakat penghuni kampung.⁵

Secara teoretis solidaritas sosial masyarakat kampung mewujud dalam berbagai kegiatan profan dan sakral yang menunjukkan kebersamaan dan kerukunan yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Solidaritas sosial dicirikan oleh dorongan memajukan tujuan-tujuan kelompok. Tujuan ini adalah supaya setiap anggota yang tergabung dalam kelompok dapat merasakan sikap positif dan menerima hak-hak sosial. Hechter, seperti dikutip oleh Örjan Widegren, mengasumsikan bahwa solidaritas sosial dapat diidentifikasi melalui tingkat, jumlah, dan intensitas kontribusi atau sumbangan anggota kelompok ke arah pencapaian tujuan bersama.⁶ Dari pandangan ahli teori yang ditulis secara singkat ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan solidaritas sosial yang dipraktikkan oleh masyarakat kampung Kota Surabaya yang termanifestasi dalam lembaga sosial, yakni *Sinoman* dan Rukun Kampung Kota Surabaya (RKKS).

POTRET TENTANG KAMPUNG

Penduduk Surabaya tidak seluruhnya bermukim di kampung, tetapi bertempat tinggal di permukiman-permukiman baru (perumahan) dan permukiman lama yang secara eksklusif dihuni oleh komunitas Eropa, Cina, dan Arab. Pemisahan permukiman penduduk pada masa pemerintahan Hindia Belanda merupakan implementasi dari kebijakan segregasi etnik. Identifikasi kampung dapat dilihat dari kondisi fisik yang berkebalikan dengan perumahan/permukiman Eropa. Sebagian karakteristik kampung hampir mirip dengan desa, misalnya jauh dari perhatian pemerintah dan minim infrastruktur pendukung. Meskipun kampung-kampung di kota berada dekat dengan kekuasaan, independensi penduduk kampung relatif sama dengan desa-desa yang jauh dari pusat kota.

Pola pertumbuhan alamiah infrastruktur kampung dan desa relatif sama, yaitu rumah hunian dibangun sederhana dan tanpa perencanaan. Perbedaan

⁵Egalitarianisme adalah kecenderungan berpikir bahwa seseorang harus diperlakukan sama pada dimensi, seperti agama politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

⁶Örjan Widegren. 1997. "Social Solidarity And Social Exchange," dalam *Sociology*, Vol. 31, No. 4 (November), hlm. 755-756.

menonjol antara desa (yang lokasinya jauh dari kota) dan kampung (yang lokasinya di dalam kota) terletak pada tata ruang, kepadatan penduduk, dan mata pencaharian. Desa-desa di pedalaman masih menyisakan bagian-bagian ruang yang luas, seperti pekarangan, rumah, halaman, dan kebun. Lahan di lingkungan kampung dari waktu ke waktu semakin menyempit karena pemanfaatan tanah untuk keperluan bangunan atau hunian. Hal ini terkait dengan meningkatnya jumlah penduduk. Data jumlah penduduk per dekade terus meningkat seperti tampak pada Tabel 9.1.

Tabel 9.1
Populasi dan Komposisi Penduduk Kota Surabaya

Tahun	Bumiputra	Cina	Eropa	Arab	Timur Asing	Jumlah Total
	Jumlah (%)	Jumlah (%)	Jumlah (%)	Jumlah (%)	Jumlah (%)	%
1906	124.473 82,89	14.843 9,88	8.063 5,37	2.482 1,65	327 0,21	150.188 100
1920	148.411 78,98	18.020 9,59	18.714 9,96	2.593 1,38	165 0,09	187.903 100
1930	265.872 77,87	42.768 12,53	26.502 7,76	4.994 1,46	1.303 0,38	341.439 100
1940	308.000 77,63	47.884 12,07	34.576 8,72	5.242 1,32	1.027 0,26	396.729 100
1950	568.877 79,63	102.363 14,33	33.808 4,73	7.419 1,04	1.962 0,27	714.429 100
Kenaikan/Penurunan Jumlah Penduduk (dalam %)						
1906–1920	19,23	21,40	132,09	4,47	-49,54	25,11
1920–1930	79,15	137,34	41,62	92,59	689,69	81,71
1930–1940	15,84	11,96	30,47	4,97	-21,18	16,19
1940–1950	84,70	113,77	-2,22	41,53	910,42	80,08

Sumber: Diolah dari G. H. von Faber. 1936. *Nieuw Soerabaia, de geschiedenis van Indie's voornaamste koopstad in de eerste kwarteeuw sedert hare intelling 1906–1931*. Soerabaia: Van Ingen, hlm. 2; *Verslag der Gemeente over Jaar 1927 & 1940*; dan *Terompet Masyarakat*, 1 April 1953.

Angka di Tabel 9.1 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk.⁷ Kenaikan jumlah penduduk paling tinggi terjadi pada kurun waktu tahun 1920 sampai 1930 sebesar 81,71% yang berarti terjadi kenaikan rata-rata per tahun sebesar 8%. Jumlah penduduk Eropa mengalami kenaikan tinggi pada tahun 1906 sampai 1920, yaitu rata-rata per tahun sebesar 9%, sedangkan tahun 1930 sampai 1940, rata-rata per tahun sebesar 3%. Kenaikan pesat jumlah penduduk Cina terjadi pada tahun 1920 sampai 1930, yaitu rata-rata per tahun sebesar 14%. Jumlah penduduk Bumiputra antara tahun 1906 sampai 1920 naik sebesar 19,23%. Peningkatan jumlah penduduk, khususnya Bumiputra, dipengaruhi oleh arus urbanisasi yang didorong oleh kesempatan kerja. Kelompok pendatang ini tentu membutuhkan tempat tinggal.

Kampung merupakan area yang memungkinkan para pendatang bermukim sehingga hunian di kampung semakin lama semakin padat. Bahkan, muncul rumah-rumah di luar kampung inti. Nama kampung yang baru muncul biasanya merujuk nama kampung lama, misalnya Kampung Ampel memiliki beberapa sebutan, seperti Ampel Asahan, Ampel Blumbang, Ampel Sawahan, dan Ampel Kejeron; Kampung Gembong memiliki beberapa sebutan, seperti Gembong Pecinan, Gembong Sawah, dan Gembong Sayuran; Kampung Genteng memiliki beberapa sebutan, seperti Genteng Sidorejo, Genteng Sidomukti, Genteng Sidodadi, Genteng Kali, dan Genteng Bandar Lor.⁸ Penyebutan nama kampung dengan mencantumkan nama rujukan sebagai cara mengidentifikasi tempat tertentu, misalnya Ampel Sawahan dan Gembong Sawah. Istilah "sawah" adalah cara mengidentifikasi kampung yang baru muncul, bahwa sebelum menjadi kampung, area itu merupakan lahan sawah.

Perbedaan antara kampung dan perumahan tampak pada bangunan rumah. Beberapa konsentrasi perumahan, seperti Simpang, Blauran, Kedungdoro, Darmo, Embong Malang, Genteng, Kayun, Keputran, dan Ketabang memiliki ciri-ciri serupa, seperti rumah berarsitektur modern, halaman luas, jalan lebar, lantai rumah berkeramik, bangunan dibuat dari batu

⁷ Meningkatnya jumlah penduduk kota dipengaruhi oleh perkembangan industri di Kota Surabaya yang menarik orang di sekitarnya bermigrasi. Industrialisasi juga semakin meningkatkan arus lalu lintas perdagangan. Keduanya menciptakan peluang kerja yang dipasok oleh tenaga kerja dari luar kota. *Liberty*, Nomor 494, 23 Februari 1963.

⁸ Anonim. 1953. *Petunjuk Kota Surabaya*. Surabaya: Pustaka Marfiah, hlm. 323–395, halaman ini berisi daftar nama kampung.

bata, dan di dalam rumah terdapat perabotan modern. Beberapa ciri-ciri fisik ini menunjukkan keserasian. Rumah-rumah di kampung tentu tidak seragam seperti kondisi fisik perumahan Eropa karena bahan bangunan berbeda-beda. Selain itu, jarak bangunan atau rumah berhimpitan tak beraturan, dindingnya perpaduan antara batu bata dan anyaman bambu, berlantai tanah, dan ruas jalan sempit berkelok-kelok. Jalan tidak hanya digunakan untuk akses keluar-masuk penduduk, tetapi juga aliran air ketika musim hujan datang. Jalan kampung berubah menjadi saluran air karena tidak ada atau terbatasnya sanitasi lingkungan yang memadai. Kondisi ini membuat jalan becek dan berlumpur pada saat musim hujan, tetapi berubah keras dan berdebu pada saat musim kemarau.⁹ Perumahan dan rumah-rumah kampung menunjukkan pemandangan kontras. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak memperhatikan kampung meskipun Surabaya telah ditetapkan sebagai *gemeente* sejak 1 April 1906.¹⁰

Menurut Akhudiat, rumah-rumah di kampung tidak mengalami perubahan berarti dari awal hingga pertengahan abad ke-20. Bangunan rumah masih banyak yang bergaya topeng, yaitu depan tampak rapi dengan dinding tembok batu bata dan lantai ubin, tetapi bagian belakang untuk kamar tidur dan dapur berdinding anyaman bambu (*gedhek*) dan lantai tanah.¹¹ Jalan kampung disebut *gang* yang berfungsi sebagai jalur keluar-masuk penduduk kampung sekaligus aliran air di waktu hujan. Kondisi ini berkebalikan dengan hunian yang dibangun melalui perencanaan oleh pemerintah kota yang dilengkapi jalan dan selokan memadai.¹² Hal ini menunjukkan bahwa

⁹William H. Frederick. 1989. *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926–1946)*. Jakarta: Gramedia, hlm. 16.

¹⁰Status *gemeente* lebih besar ditujukan mengakomodasi kepentingan penduduk Eropa daripada mayoritas Bumiputra yang tinggal di perkampungan. Pemerintah kota terlibat pada urusan kampung ketika terjadi situasi darurat yang harus mendapat penanganan, seperti pemberantasan wabah pes tahun 1910 dan penanggulangan kolera tahun 1918. Wujud perhatian pada kampung direalisasikan secara serius pada tahun 1924 melalui program perbaikan kampung (*kampongverbetering*). G. H. von Faber. 1936. *Nieuw Soerabaia, de geschiedenis van Indie's voornaamste koopstad in de eerste kwarteeuw sedert hare intelling 1906–1931*. Soerabaia: Van Ingen, hlm. 2 & 30; H. W. Dick. 2002. *op. cit.*, hlm. 184–185.

¹¹Pendapat itu dikemukakan oleh Akhudiat merujuk pada rumah-rumah kampung pada tahun 1950-an, maka lebih jauh dari waktu yang disebutkan itu, berarti bangunan rumah tentu lebih sederhana. Akhudiat. 2008. *Masuk Kampung Keluar Kampung, Surabaya Kilas Balik*. Surabaya: Henk Publica, hlm. 14.

¹²Pewarta Soerabaia, 6 Mei dan 3 Juni 1918.

pembangunan kampung cenderung tidak diperhatikan secara serius sehingga identik dengan hal-hal fisik yang serba kurang.¹³ Kondisi fisik di kampung-kampung tidak menunjukkan perubahan berarti meskipun telah berganti-ganti pemimpin selama hampir seperempat abad sejak pemerintah *gemeente* (ditetapkan pada 1906) hingga memiliki walikota definitif sejak tahun 1916.

Residen Surabaya sendiri yang menilai keadaan jelek kampung ketika menyampaikan pidato tentang urgensi pembangunan asrama pelajar di Kota Surabaya pada tahun 1921. Berdasarkan penjelasannya, murid sekolah menengah di Kota Surabaya yang berasal dari luar kota berjumlah 872 (139 murid di Hoogere Burger School dan 733 di sekolah menengah lain). Dia menyebutkan keadaan kampung yang dijelaskan sebagai berikut, "*hal ini ternjata, moerid-moerid sekolah pertengahan pada berdiam di kampoeng dan di tempat jang amat djelek, seperti dalem roemah gedhek zonder dapet tempo baik boeat beladjar.*"¹⁴

Kampung mulai mendapatkan perhatian dan anggaran perbaikan dari pemerintah kota pada tahun 1924.¹⁵ Perbaikan ini juga tidak menyeluruh menysasar pada kampung.

INDEPENDENSI DAN IDENTITAS PENDUDUK KAMPUNG

Kampung pada masa kolonial cenderung independen tanpa bergantung secara berlebihan terhadap uluran bantuan pemerintah. Dalam hal tanggung jawab keamanan kampung, misalnya, semua penduduk berkewajiban berperan serta menjaga keamanan secara bergantian yang dikoordinasi oleh salah satu orang dari warga kampung. Ronda diadakan untuk menjaga keamanan kampung dan menyelidiki gangguan-gangguan. Para peronda berkeliling dalam batas lingkungan kampung yang disebut *ronda slamet*.¹⁶ Laki-laki dan pemuda dewasa mengambil giliran untuk jaga malam dengan beberapa perlengkapan, seperti kentongan untuk memberi peringatan, tombak, dan

¹³W. F. Wertheim dan The Siauw Giap. 1962. "Social Change in Java, 1900-1930," dalam *Pacific Affairs*, Vol. 35, No. 3 (Autumn), hlm. 233.

¹⁴*Pewarta Soerabaia*, 9 April 1921. Berita-berita yang dimuat juga menunjukkan bahwa secara umum kampung-kampung kota tumbuh secara alami memiliki kondisi fisik yang jelek. *Pewarta Soerabaia*, 1 & 18 Maret 1921; 27 Juli, 10 & 12 September 1923.

¹⁵H. W. Dick, *op.cit.*, hlm. 184-185.

¹⁶G. H. von Faber, *op. cit.*, hlm. 97.

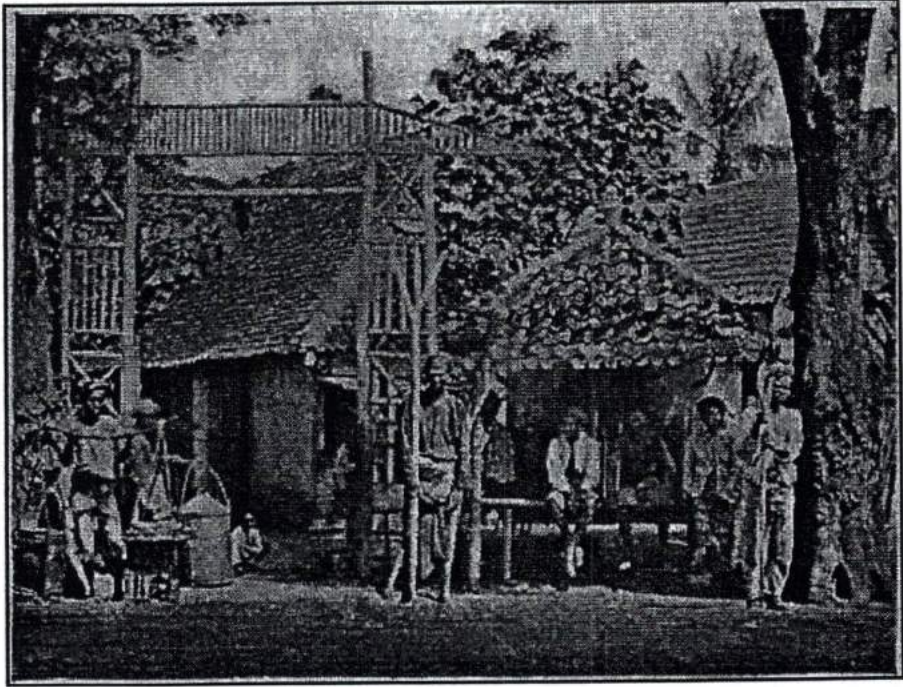
tongkat panjang bercabang untuk menjangkau dan menangkap pencuri. Kentongan yang dipukul secara teratur dan terus-menerus menyampaikan pesan bahwa di suatu tempat sedang terjadi kebakaran, sedangkan kentongan yang dipukul cepat tidak beraturan berarti telah terjadi pencurian dan pembunuhan.¹⁷

Gardu-gardu sederhana dibangun secara swadaya yang berfungsi sebagai pos keamanan. Pada Gambar 9.1 tampak gardu pada akhir abad ke-19 sebagai pintu masuk kampung. Gardu terlihat tidak hanya berfungsi sebagai pos jaga, tetapi juga sebagai ruang bersama untuk *cangkrukan*, tempat berkumpulnya penduduk kampung, dan menjadi pemberhentian pedagang keliling. Sebagian warga kampung menjalin kontak dan dialog secara bebas, akrab, dan tanpa dihalangi oleh hierarki sosial. Dengan demikian, gardu kampung pada masa kolonial dapat dianggap sebagai ruang publik bagi warga dan dapat diduga tukar informasi dapat berlangsung di gardu-gardu ini.

Independensi lain penduduk kampung dalam hal mengusahakan mata pencaharian. Menjelang pertengahan abad ke-19, penduduk kampung mulai tidak menyandang predikat orang Jawa yang berkultur agraris karena ada tanda-tanda perubahan terutama industrialisasi yang diikuti oleh gelombang pendatang ke Kota Surabaya. Pendatang yang memasuki Surabaya dan bertempat tinggal di kampung pada umumnya tertarik dan terikat oleh alasan ekonomi. Penduduk kampung tidak hanya bertumpu pada produksi pertanian, sebagian dari mereka cenderung bergerak datang dan pergi dalam rangka bekerja di berbagai sektor, baik di pabrik maupun jasa. Pendatang yang mampu beradaptasi dengan penduduk asli kampung dianggap sebagai orang baru yang dapat membaur karena percaya dan sadar menjadi bagian kampung. Dengan sendirinya, penduduk kampung dianggap menyandang dan mewarisi tradisi keberanian, realisme, dan dedikasi bagi kemajuan material. Pendatang yang mampu menyatu dan mengikatkan diri tentu dapat disebut *Arek Surabaya*.

Dari ilustrasi itu, disebutkan bahwa *Arek Surabaya* tidak hanya terdiri atas satu kelompok etnik, tetapi beberapa unsur etnik yang dianggap dapat membaur. William H. Frederick menyatakan *Arek Surabaya* adalah penduduk

¹⁷Ruslan Abdulgani dan William H. Frederick. 1974. "My Childhood World," dalam *Indonesia*, No. 17 (April), hlm. 114.



Gambar 9.1 Gardu Kampung pada Akhir Abad ke-19

Sumber: G. H. von Faber. 1931. *Oud Soerabaia, de geschiedenis van indie's eerste koopstad van de oudste tijden tot de instelling van gemeenteraad 1906*. Soerabaia: Gemeente Soerabaia, hlm. 95.

"asli" Surabaya.¹⁸ Istilah "asli" merujuk pada kemauan pendatang untuk menyatu. Pendatang menjadi bagian yang mewarnai masyarakat kota sebagaimana ditulis oleh seorang wartawan dari Kalimantan yang menilai orang Surabaya, berbunyi, "*boemipoetra kota Soerabaia itoe toeroenan daripada bangsa Djawa asli joega tetapi kebanyakan soedah bertjampoer dengan orang keloearan. [.....] hanja jang tertinggal tetap masih memakei*

¹⁸William H. Frederick, *op.cit.*, hlm. 8.

adat pakean dan bahasa Jawa asli, segala orang-orang bangsawan atawa poeta-poetra bangsawan sadja."¹⁹

Kutipan kalimat ini menyatakan bahwa masyarakat Surabaya itu majemuk dengan unsur dominan etnik Jawa. Namun, akibat dari kemajemukan dan percampuran yakni unsur-unsur budaya Jawa banyak mengalami perubahan, misalnya pakaian dan bahasa, tidak lagi menunjukkan kemurnian Jawa. Bahasa tidak hanya penting sebagai penanda perbedaan etnik, tetapi juga perantara yang berharga untuk mengungkapkan identitas sosial. Kemampuan berbicara menggunakan kombinasi pilihan kosakata (diksi) khas, morfologi kata kerja, intonasi, dan sikap sejajar menunjukkan hubungan sosial di antara penutur.²⁰ Mayoritas masyarakat kampung Surabaya menggunakan bahasa Jawa *Kromo* maupun *Ngoko* ketika berkomunikasi, tetapi penggunaan bahasa Jawa *Ngoko* dialek Surabaya lebih dominan. Dialek atau logat pengucapan dan berbicara terdengar tidak melodis, tidak berirama, dan intonasinya datar sehingga bunyi yang dihasilkan terdengar jelas, lugas, dan terkesan kasar.²¹

Ungkapan yang diucapkan dalam komunikasi juga terkesan sederhana tetapi agak sulit ditirukan oleh orang luar yang bukan penutur.²² Logat Jawa Surabaya digunakan oleh penduduk kampung dalam komunikasi antar *Arek* Surabaya. Masyarakat kampung seolah-olah hanya mampu menguasai bahasa *Jawa Ngoko* dan *Kromo Ndiko* atau *Madyo* yang terkesan lugas. Menurut Saripan Sadi Hutomo, struktur kalimat bahasa Jawa dialek Surabaya tak berbeda dengan bahasa Jawa umumnya, tetapi intonasi dan fonetiknya yang berbeda. Intonasi bahasa Jawa dialek Surabaya mirip dengan intonasi bahasa Madura. Praktik berbahasa dan komunikasi ini diwariskan secara turun-temurun di lingkungan kampung.²³

¹⁹ *Bintang Soerabaia*, 27 April 1904.

²⁰ Nancy J. Smith-Hefner. 1989. "A Social History of Language Change in Highland East Java," dalam *The Journal of Asian Studies*, Vol. 48, No. 2 (May), hlm. 258.

²¹ Deskripsi sebuah ucapan bernilai atau berukuran melodis, berirama, tinggi, rendah, cepat, atau lambat sulit untuk disampaikan dengan kata-kata. Masing-masing orang tentu dapat membandingkan tradisi pengucapan masyarakat Surabaya dan Surakarta atau masyarakat Surabaya dan Sunda.

²² Boedhimoerdono. 2003. *Jalan Panjang Menuju Kota Pahlawan* (Surabaya: Pusura), hlm. 57.

²³ Contoh perbedaan fonetik terletak pada vokal maupun konsonan, misalnya *piték* menjadi *péték*, *irung-èrung*, *wuwung-wowong*, *dhuwur-dhukur*, *nggolèki-ndèlèki*, *siji-sithuk*, *kari-gari*. Saripan Sadi Hutomo. "Linguistic Folklor: Bahasa Jawa Dialek Surabaya," *Kesenian, Bahasa, dan Folklor Jawa*, ed. Soedarsono. 1986. Yogyakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 353.

Istilah sapaan yang paling populer di kalangan masyarakat Surabaya adalah *cak* (laki-laki) dan *ning* (perempuan) yang berarti kakak. Kata *cak* diduga merupakan kependekan dari *cacak* yang berasal dari serapan bahasa Cina, *tacak* (kakak laki-laki) dan *tacik* (kakak perempuan). Orang Tionghoa peranakan yang dilahirkan di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 secara umum berkomunikasi dengan bahasa sehari-hari Bumiputra. Mereka telah memakai kombinasi istilah dalam bahasa Tionghoa, Melayu, dan Belanda.²⁴ Bahasa Jawa dialek Surabaya merupakan bahasa rakyat yang banyak memiliki ungkapan lugas atau kasar jika diukur menurut bahasa Jawa Tengahan, misalnya *diancuk*, *diamput*, dan *jangkrik*.²⁵ Istilah ini tidak selalu diartikan kasar dan tabu diucapkan, tetapi tergantung situasi penggunaannya, misalnya marah, kagum, kaget, jengkel, dan puas. Bagi penutur asli, tidak ada kesan kotor untuk ucapan itu, misalnya, teman yang lama berpisah lalu bertemu, maka kata-kata itu diucapkan bukan sebagai makian tetapi kata keakraban.²⁶

Identitas budaya kampung atau disebut *Arek* Surabaya juga ditunjukkan oleh serangkaian kegiatan di hari-hari khusus yang berkaitan dengan ritual. Aktivitas ini diselenggarakan berkelompok dan individual dalam bentuk *slametan*.²⁷ Acara *slametan* dilakukan bersama jika berhubungan dengan perayaan keagamaan dan kampung, misalnya Maulud Nabi Muhammad dan Sedekah Bumi (*Nyadran*). *Slametan* menyangkut ritus pribadi biasanya dilakukan sendiri, misalnya kelahiran, khitanan, pernikahan, dan kematian. Ritual *slametan* kampung dikenal oleh masyarakat setempat dengan istilah Sedekah Bumi. Prosesinya dilakukan dengan cara berdoa memohon keselamatan kampung dari bahaya dan bencana yang tidak diduga. Bentuk ritual ini disebut sebagai pesta kampung karena doa bersama yang dipanjatkan disertai dengan makanan dan minuman yang disantap bersama. Beraneka

²⁴Leo Suryadinata. 1988. *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, hlm. 2

²⁵Kata *diancuk* dan *diamput* berasal dari kata dasar *ancuk* dan *amput* yang artinya sama, yaitu setubuh. Pengucapan dan konotasinya mengalami perubahan menjadi *jancuk* dan *jamput*. Boedimoerdhono, *op. cit.*, hlm. 58.

²⁶Saripan Sadi Hutomo, *op. cit.*, hlm. 360.

²⁷Istilah *slametan* dibentuk dari kata dasar bahasa Jawa *slamet*, yang artinya selamat atau terhindar dari bahaya. *Slametan* yang diadakan untuk kepentingan individu menyangkut siklus hidup seseorang sejak masa sebelum kelahiran, masa hidup, dan kematian selama seribu hari sesudah meninggal dunia. *Slametan* yang diadakan untuk kepentingan suatu kelompok, misalnya upacara bersih desa.

jenis makanan yang akrab dengan kehidupan sehari-hari masyarakat kampung dihidangkan. Pada Gambar 9.2 tertera keterangan, "*Selamatan matjam baroe. Anggoer poen ta' koerang pada kandoerian ini.*"²⁸



Gambar 9.2 Aktivitas *Slamatan* di Kampung

Sumber: *Bintang Hindia*, Nomor 1 Tahun II, 1904, hlm.4.

Ritual *slamatan* kampung merupakan kegiatan pesta makan yang mengandung makna, seperti religi, kebersamaan atau gotong royong, dan kerukunan masyarakat. Makna religi pada *slamatan* terkait perannya sebagai media penghubung alam nyata dan gaib yang sudah lama mengakar dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari. Nilai kebersamaan dan kerukunan ditunjukkan oleh masyarakat kampung ketika mereka mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan selanjutnya. Setelah acara ritual *slamatan* selesai, kampung yang memiliki dana masih melanjutkan acara-acara yang lebih meriah dengan pesta hiburan kesenian wayang kulit, tayuban, dan ludruk sesuai kesepakatan warga kampung. Bagi kampung yang tidak menyelenggarakan hiburan dapat bergabung menikmati tontonan di kampung tetangga.²⁹ Berikut ini contoh dua kampung mengadakan hiburan untuk keperluan Sedekah Bumi.

²⁸ *Bintang Hindia*, Nomor 1 Tahun II, 1904, hlm.4

²⁹ *Bintang Soerabaia*, 4 Mei 1904.

Orang pendoedoek di kampoeng Pregolan nanti sedikit hari bakal membikin slametan sidekah boemi dengan pake tajoeban dan loedroekan sebagai biasanja saben tahoen sekali katanja nanti teronja hendak diatoernja jang lebih elok dari jang soeda soeda.³⁰

Soeda tamtoe nanti malem Minggoe tanggal 28 Mei 1904 di mana kampoeng Semampir ada slametan sidekah boemi dengan wajangan lakonnja Brontojoedo, ja itoe oeran oeran Djojjobingoen dan besoeok paginja teroes plesiran tandakan dari ini satoe kampoeng soeda masoehoer rameenja kaloe sidekah boemi sebab loerah nja amat accoord sama orangnja.³¹

Kebiasaan itu diduga sebagai perpaduan antara ritual Hindu dan Islam, tetapi tidak jelas kapan tradisi ini dimulai. Perilaku sinkretis tidak dihilangkan meskipun diketahui bahwa Surabaya menjadi pusat pengajaran agama Islam telah berlangsung sejak zaman Majapahit. Mayoritas penduduk kota beragama Islam yang terbukti dari beberapa masjid tua yang terdapat di beberapa tempat. Masjid lama yang berdiri pada masa Sunan Ampel, yaitu masjid Rahmat Kembang Kuning dan Ampel, mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Satu lagi yang tergolong tua, yaitu Masjid Kemayoran, didirikan pada tahun 1773–1775 yang ditujukan pada kaum Muslim Surabaya.³² Pusat menjalankan ritual keagamaan dilakukan di masjid dan *langgar* yang terdapat di hampir setiap kampung, seperti yang disebut dalam *Bintang Soerabaia*, "*Pada tiap-tiap kampoeng hampir semoewanja ada soerau, sebagai kampoeng Arab, kampoeng Melajoe, dan tiap-tiap kampoeng Djawa.*"³³

Kemeriahan ibadah di *langgar* dan masjid sangat tampak selama bulan ramadan (*wulan poso*). Bahkan, semangat ibadah itu terlihat ketika masyarakat menyambut datangnya bulan suci umat Islam dengan mempraktikkan ritual ziarah kubur dan tabur bunga. Hal ini sebagai praktik dan pelestarian tradisi menghormati dan mendoakan leluhur. Selama bulan puasa, kehidupan kampung lebih meriah dibanding dengan bulan lainnya karena sebagian

³⁰ *Bintang Soerabaia*, 24 Mei 1904.

³¹ *Bintang Soerabaia*, 25 Mei 1904.

³² Anonim. 1926. *Masjid dan Makam Islam*. Weltevreden: Balai Poestaka, hlm. 19.

³³ *Bintang Soerabaia*, 27 April 1904. Dari buku *Petunjuk Kota Surabaia* diketahui ada 21 masjid dan 320 *langgar*. Anonim. 1953. *Petunjuk Kota Surabaia*. Surabaia: Pustaka Marfiah, hlm. 167–174.

penduduk berusaha meningkatkan ibadah pada malam dan dini hari.³⁴ Pada sepertiga terakhir bulan puasa merupakan hari istimewa yang diyakini malam penuh berkah. Sebagian dari penganut Islam menyempatkan diri untuk beribadah dan berziarah di masjid dan situs peninggalan Sunan Ampel.³⁵

PERKUMPULAN *SINOMAN* MENGUATKAN KEBERSAMAAN

Karakteristik yang menunjukkan tipologi kampung adalah perkumpulan *sinoman*. Menurut Th. Pigeaud, *sinoman* merupakan komunitas penghidang makanan yang disebut "*tuhan ning wadwa rarai*". Anggota dari perkumpulan ini terdiri atas pemuda-pemuda pelayan, baik para pria/perjaka maupun para gadis yang melayani atau menyajikan hidangan. Realitas mengenai anggota *sinoman* tidak ditentukan secara ketat berdasar usia, tetapi lebih fleksibel pada warga kampung untuk menjadi anggota perkumpulan. Oleh karena itu, pengertian *sinoman* mengalami perluasan pada perkumpulan kelompok umur sebaya.³⁶ Secara etimologis, penamaan *sinoman* diambil dari kata dalam bahasa Jawa, yakni *sinom* atau *enom*, istilah ini artinya muda atau masih muda, jika ditujukan pada manusia berarti pemuda. Dalam pengertian lebih luas, lembaga sosial ini menyatukan penduduk atau warga kampung dalam hal menguatkan semangat gotong-royong yang dipraktikkan dalam peristiwa kematian dan perhelatan pesta.³⁷

Perkumpulan *sinoman* merupakan perwujudan dari salah satu ciri masyarakat Surabaya bertempat tinggal di perkampungan. Posisi golongan Indo dan elite Bumiputra berada di luar *sinoman* karena itu tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang dilakukan masyarakat kampung. Dengan demikian, perkumpulan *sinoman* hanya terdapat di kampung dan anggotanya juga orang-orang kampung. Hampir setiap kampung di Kota Surabaya memiliki perkumpulan *sinoman*. Hal ini sebagai perwujudan perasaan kesederajatan penduduk kampung dan cerminan penduduk asli Surabaya. Anggota *sinoman* kampung di Kota Surabaya pada awal abad ke-20 tidak lagi berpusat pada para

³⁴Boedhimoerdono, *op. cit.*, hlm. 27-28.

³⁵G. H. von Faber, *op. cit.*, hlm. 49.

³⁶Th. Pigeaud. 1958. "Javanese Gold," dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Deel 114, 1/2de Afl., hlm. 193.

³⁷*Bintang Hindia*, Nomor 15 Tahun III, 1904.

pemuda kampung, tetapi sebagian besar kaum sebaya dan orang-orang yang berpengalaman untuk berperan serta atas dasar hubungan kekeluargaan.³⁸



Gambar 9.3 Perkumpulan *Sinoman*

Sumber: *Bintang Hindia*, Nomor 15 Tahun III, 1904

Pada Gambar 9.3 ditunjukkan sekelompok anggota *sinoman* sedang berpose. Wajah-wajah dan pakaian kemeja, peci, dan sarung yang tergambar menunjukkan tingkatan usia sebaya. Anggota *sinoman* memosisikan diri sebagai perangkat yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung. Kontribusi yang diberikan oleh perkumpulan ini berupa bantuan tenaga dan keuangan pada peristiwa khusus, seperti berkabung, perayaan, pernikahan, dan khitanan.³⁹ Fungsi umum perkumpulan ini adalah koordinasi gotong royong. Iuran tetap tidak dipungut, tetapi pada kesempatan

³⁸*Bintang Hindia*, Nomor 15 Tahun III, 1904; William H. Frederick, *op. cit.*, hlm. 24 dan 27.

³⁹*Bintang Hindia*, Nomor 15 Tahun III, 1904.

tertentu meminta sumbangan sekadarnya pada para anggota.⁴⁰ Menurut Boedhimoerdono, keberadaan *sinoman* memang dibutuhkan masyarakat kampung, selain kegiatan seperti yang disebutkan, organisasi sosial ini berhubungan dengan adat-istiadat dan keagamaan. Dukungan anggota pada perayaan pesta sejalan juga dengan kebiasaan masyarakat dalam hal menyumbang.⁴¹

Setiap orang yang tinggal di kampung dan dianggap sebagai penduduk asli dipastikan menjadi anggota sehingga berkewajiban membayar iuran. Besaran iuran dan waktu pengumpulan sesuai kesepakatan. Uang yang terkumpul digunakan membeli perlengkapan yang dibutuhkan untuk pesta pernikahan dan pemakaman. Alat perlengkapan ini dipakai bersama-sama ketika terjadi kematian dan pesta. Perlengkapan pesta terdiri atas tenda, tiang-tiang penyangga, dan atap dari seng (*terop*), piring, gelas, cangkir, sendok, garpu, tikar, kursi, meja, dan perabotan atau perkakas lainnya. Perlengkapan pemakaman terdiri atas tandu, tong air, kain kafan, cangkul, dan alat-alat lain yang dibutuhkan untuk penguburan.⁴² Seluruh perlengkapan yang dimiliki digunakan untuk memperlancar kegiatan. Bantuan tenaga pada acara pesta pernikahan diwujudkan dengan cara menghias rumah, mendekorasi ruang, dan melayani tamu. Pada saat terjadi peristiwa kematian, para anggota *sinoman* diwajibkan datang membantu meringankan beban yang sedang berkabung. Secara bergotong-royong, mereka menyiapkan kebutuhan penguburan mayat, mulai dari memandikan, menjaga, mengusung, menggali tanah, dan mengubur.⁴³

Pekerjaan itu dilakukan secara sukarela yang dikoordinasi oleh ketua. Ketua *sinoman* dipilih dari dan oleh penduduk kampung. Orang yang terpilih tentunya berpengaruh di lingkungan kampung.⁴⁴ Masyarakat tidak menyebut pemimpin *sinoman* dengan istilah ketua, tetapi dengan sebutan *Lurab Sinoman*,⁴⁵ tetapi tidak mempunyai pembantu/perangkat resmi seperti kepala

⁴⁰G. H. von Faber. 1936. *Nieuw Soerabaia, de geschiedenis van indie's voornaamste koopstad in de eerste kwarteeuw sedert hare instelling 1906-1931*. Soerabaia: Van Ingen, hlm. 44.

⁴¹Boedhimoerdono, *op. cit.*, hlm. 46.

⁴²Ruslan Abdulgani dan William H. Frederick, *op. cit.* hlm. 115.

⁴³G. H. von Faber. 1936. *op. cit.*, hlm. 45.

⁴⁴*Bintang Hindia*, Nomor 15 Tahun III, 1904.

⁴⁵Boedhimoerdono, *loc. cit.*

kampung. Namun, perannya seolah-olah menggantikan kepala kampung dalam struktur pemerintah, seperti tampak dalam tulisan berjudul "Boeat Bikin Gampang Oeroesan" berikut.

Pendoedoek Boemipoetra di kampung Djatipoerwo (Sawah Poelo) ada niatken boeat bikin satoe perkoempelan sinoman, jaitoe boeat membikin gampangnja oeroesan orang-orang di itoe kampoeng dengan pembesar gemeente atawa pada politie. Sebab sekarang ini, itoe perhoeboengan, ada soesah, seperti kaloe ada oeroesan apa-apa jang moesti diketahoei pada pembesar politie atawa pada pembesar gemeente, wijkhoofd boekan orang jang moestinja disoeroeh boeat merapportkan. Kaloe itoe Sinoman soeda berdiri, oeroesan jang boeat kapentingannja itoe kampoeng, bisa dioeroes dengan lebih lebih baik oleh sinoman.⁴⁶

Kutipan di atas menegaskan bahwa keberadaan perkumpulan *sinoman* merupakan unsur penting kampung. Keberadaannya seolah-olah mengesampingkan peran lembaga formal dalam menjaga pelestarian tradisi, menyatukan penghuni kampung, dan representasi Arek Surabaya. Sampai pertengahan abad ke-20, karakteristik kehidupan kampung yang khas diungkapkan sebagai berikut.

Kalau biasanja penduduk kota besar itu mempunjai sifat dan tjara hidup jang individualistis sekali, egoistis amat, penduduk kampungnja djustru tidak. Bahkan, lebih-erat dan rukun keadaannja. Orang jang bertempat tinggal di kota-kota besar, dalam gedung-gedung flat, djuga mempunjai tjara dan penghidupan jang individueel sekali. Tetapi dalam kampung tidak. Penghidupan dalam kampung itu merupakan satu keluarga besar. Bantu membantu, djaga mendjaga. Tiap ada orang kesusahan, seluruh kampung membantu. Djika rumah ditinggalkan karena berpergian, tetangga mendjaganja. Pendeknja aman dan rukun.⁴⁷

Organisasi sosial lain yang lahir di lingkungan masyarakat adalah rukun kampung dan rukun tetangga. Organisasi ini merupakan persekutuan ketetanggaaan yang diadopsi dari konsep tradisional masyarakat Jepang. Lembaga ini dipraktikkan dalam mengawasi dan mengendalikan satuan

⁴⁶Pewartu Soerabaia, 5 Februari 1932.

⁴⁷"Bertempat Tinggal di Kampung" dalam *Tjermijn*, Nomor 339, Tahun VIII, 30 Maret 1957.

masyarakat.⁴⁸ Hal ini berarti perubahan penataan organisasi kampung tampak pada saat Jepang menguasai Kota Surabaya. Akan tetapi, pola pembagian wilayah dan struktur pemerintahan masih identik dengan pemerintah Hindia Belanda.⁴⁹ Rukun tetangga merupakan warisan dari pemerintah pendudukan Jepang, disebut *tonarigumi* yang dibentuk pada tahun 1944. Banyak kampung menyesuaikan *sinoman* ke dalam kerangka besar sistem baru tersebut.

RUKUN KAMPUNG KOTA SURABAYA

Kota Surabaya ditetapkan secara politis sebagai kota besar pada tahun 1950 meskipun realitas ekonomi dan infrastruktur tidak dimulai pada tahun itu. Jika ditinjau dari segi politik administratif, sejak 1 April 1906, Surabaya telah menyandang status *gemeente*. Dasar penetapan Kota Besar Surabaya hanya penguat dalam iklim kemerdekaan. Dasar hukumnya adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 1950. Undang-undang ini memberi kewenangan kepada kota besar untuk mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing.⁵⁰ Sejak saat itu, terjadi perubahan dalam hal pengelolaan wilayah Kota Surabaya dan pembentukan organisasi masyarakat.

Wilayah Kota Surabaya yang dibagi ke dalam *wijk* pada masa pemerintahan Hindia Belanda diganti dengan istilah *lingkungan*, yaitu lembaga pemerintahan paling bawah yang berjumlah 36 lingkungan. Status *lingkungan* sebagai bagian instansi pemerintahan secara resmi ditetapkan pada tanggal 5 April 1954 melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Besar Surabaya Nomor 30/DPRDS. Dengan peraturan ini, jumlah lingkungan bertambah 2 menjadi 38 lingkungan.⁵¹ Di setiap lingkungan terdapat organisasi masyarakat baru, yaitu rukun kampung yang dikenal dengan singkatan Rukun Kampung Kota

⁴⁸ Aiko Kurasawa. 1993. *Mobilisasi dan Kontrol, Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa, 1942-1945*. Jakarta: Grasindo, hlm. 195.

⁴⁹ Karesidenan (*shu*), kabupaten/ kotapraja (*ken/shi*), distrik atau kawedanan (*gun*), onderdistrik atau kecamatan (*son*). Di bawahnya lagi disebut *Ku* sebagai ganti *Wijk*. Wilayah Surabaya *shi* dibagi menjadi 2, yaitu Surabaya *gun* dan Jabakota *gun*. Surabaya *gun* terdiri dari 6 *son* dan 24 *ku*. Jabakota *gun* terdiri dari 4 *son* dan 79 desa. *Soeara Asia*, 15 September 1902.

⁵⁰ "Ikhtisar Sedjarah Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya," *Arsip Kota Surabaya*, Nomor 14354.

⁵¹ Wilayah kota Surabaya sampai tahun 1973 dibagi dalam 3 wilayah administratif yang terdiri dari: wilayah Surabaya Utara, Timur, dan Selatan yang dipimpin oleh kepala wilayah/ pembantu walikota, 16

Surabaya (RKKS), yang dibentuk pada 23 Januari 1950. Meskipun mirip dengan *tonarigumi*, RKKS tidak mempunyai hubungan baik organisatoris maupun administratif dengan kepala lingkungan.⁵²

Rukun Kampung Kota Surabaya merupakan organisasi kemasyarakatan nonpolitik dengan tugas pokok memelihara keamanan dan perbaikan kampung secara gotong royong. Penduduk kampung yang bergabung dicakup dalam lingkungan masing-masing. Menurut Sujanto Abdulmadjid, kerukunan kampung dihidupkan kembali dalam sebuah lembaga karena didalamnya tersimpul semangat gotong royong yang murni. Rukun kampung mempunyai bagian keamanan dan sosial. Harus ditekankan bahwa bagian sosial tidak hanya mengurus kematian semata-mata, tetapi juga harus menyuarakan adanya ketidakadilan.⁵³ Tujuan lain RKKS adalah mempertahankan dan melaksanakan hak-hak rakyat dan memperjuangkan kepentingan penduduk Surabaya dalam bidang sosial ekonomi.

Rukun kampung bukan lembaga resmi bagian dari struktur pemerintahan meskipun bentuk dan susunannya terdiri atas Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK). Rukun tetangga terdiri atas 40 rumah atau lebih yang disesuaikan menurut keadaan kampung, sedangkan rukun kampung merupakan kesatuan rukun tetangga dalam satu kampung. Rukun tetangga hanya memiliki seorang ketua dan pembantu ketua, sedangkan pengurus rukun kampung terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua bidang. Seluruh rukun kampung di Kota Surabaya diorganisasi oleh Pusat RKKS. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat pada tingkat RT dan RK. Untuk memutuskan persoalan yang menyangkut kepentingan banyak kampung dilakukan rapat anggota, pimpinan harian, dan konferensi rukun kampung.⁵⁴

RKKS pertama kalinya menyelenggarakan konferensi bertempat di Gedung Nasional Indonesia (GNI) pada tanggal 24 September 1950 yang dihadiri oleh perwakilan rukun kampung. Hasil dari konferensi itu menuntut

kecamatan dipimpin oleh camat, 38 lingkungan dipimpin kepala lingkungan, dan 103 desa dipimpin kepala desa *Gapura*, Volume VIII, Nomor 3, Mei 1975, hlm. 7.

⁵² Pernyataan di atas merupakan penjelasan Badan Per-musyawaratan Kepala Lingkungan (BPKL) atas kesimpang-siuran pembentukan RKKS di Kota Surabaya. *Pewarta Soerabaia*, 18 Juli 1953.

⁵³ Abdulmadjid, S. 1950. "Rukun Kampung Harus Bertindak Basmi Pemerasan Terhadap Rakjat," *Pewarta Soerabaia*, 23 Agustus.

⁵⁴ "Peraturan Dasar Rukun Kampung." 1952. *Suara Rakjat*, 8 Januari.

supaya pemerintah memperhatikan kurangnya perumahan dan kenaikan tarif ANIEM (listrik).⁵⁵ Dari konferensi ini, mulai muncul gejala yang mengarah pada peran politik praktis RKKS pada penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menjadi dasar Dul Arnowo, walikota Surabaya, segera menyampaikan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara sebelum tanggal 31 Oktober 1950. Gagasan pembentukan DPRDS didasarkan pada amanah Peraturan Pemerintah Nomor 39.⁵⁶ Tujuan DPRDS dibentuk adalah upaya antisipatif supaya RKKS tidak menjadi sebuah dewan perwakilan. Pada saat RKKS dibentuk, Kota Surabaya belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena itu RKKS seolah-olah seperti dewan perwakilan. Hal ini terbukti ketika konferensi kedua RKKS pada 23–24 April 1951 di GNI menghasilkan keputusan menuntut supaya diselenggarakan pemilihan umum dan pemerintah membekukan Peraturan Pemerintah Nomor 39.⁵⁷

Salah satu keputusan itu berakibat penolakan terhadap DPRDS Kota Surabaya. Ketua RKKS terpilih pada konferensi itu, Sakri, menyatakan "*RKKS dengan ini otomatis tidak mengakui lagi adanya DPRDS Kotapradja Surabaya*".⁵⁸ Pernyataan ini menimbulkan reaksi dari organisasi kemasyarakatan, seperti Masyumi, Muhammadiyah, GPPI, Perdjurais (Persatuan Djuru Rawat Indonesia), GP Ansor, SBII, STII, PII, dan Pemuda Hizbul Wathon. Organisasi kemasyarakatan ini mengadakan pertemuan bersama dengan hasil menentang tindakan dari Pusat RKKS yang telah mencampuri persoalan politik.⁵⁹

Kekhawatiran itu terbukti pada tahun 1955 ketika RKKS ditarik dalam pusaran politik praktis atau sebagai alat partai politik, yaitu menyuarakan usulan-usulan yang dianggap bertentangan, misalnya mengajak penduduk untuk menuntut melepaskan D. N. Aidit dan menuntut pembubaran DPRDS. Gerakan ke politik praktis yang dilakukan oleh pengurus RKKS mengakibatkan Rukun Kampung yang tidak sepakat berusaha mendirikan pengurus baru.⁶⁰ Meskipun RKKS bersifat nonpolitik, tetapi pada kenyataannya

⁵⁵ *Pewarta Soerabaia*, 12 Oktober 1950.

⁵⁶ *Pewarta Soerabaia*, 19 Oktober 1950.

⁵⁷ "Konferensi RKKS ke-3 pada 11–14 April 1952," 1952. *Trompet Masjarakat*, 12 April.: ke-4 pada 12–15 Juli 1963 (*Pewarta Soerabaia*, 16 & 21 Juli 1953; *Harian Umum*, 21 Juli 1953); *Suara Rakjat*, 25 April 1951.

⁵⁸ "RKKS Automatis Tidak Mengakui DPRDS Kotapradja Surabaya," 1951. *Suara Rakjat*, 7 Mei.

⁵⁹ *Pewarta Soerabaia*, 11 Juli 1953.

⁶⁰ *Java Post*, 5 Mei 1955.

telah dimanfaatkan sebagai alat memasukkan salah satu ideologi tertentu dan berusaha dibawa pada kancah politik.⁶¹ Keinginan partai politik memperebutkan RKKS dapat dimaklumi karena memiliki basis massa yang kuat di setiap *lingkungan*.

Kekuatan massa RKKS dapat dilihat dari kegiatan khusus yang diselenggarakan selalu melibatkan seluruh anggota. Pada tanggal 10 Januari 1954, pengurus Pusat Rukun Kampung Kota Surabaya mencoba mengerahkan kekuatan massa dalam kegiatan rapat terbuka di lapangan Pacar Keling. Ada beberapa lokasi strategis yang dipasang spanduk dan pamflet yang isinya mengajak masyarakat menghadiri rapat tersebut.⁶² Akan tetapi, kegiatan ini batal karena tidak mendapat izin dari pihak keamanan yang diumumkan pada tanggal 7 Januari 1954.⁶³ Menurut warga Rukun Kampung Oro-Oro, tema rapat bukan tugas dan kewenangan RKKS, tetapi menjadi bagian partai politik, seperti persoalan tanah, pemukiman, Undang-Undang Agraria, dan DPRDS Kota Surabaya.⁶⁴

Kegiatan rapat umum yang menjadi bagian dari Konferensi Besar RKKS mendapat izin pada tahun 1955. Pelaksanaannya pada tanggal 3–9 April 1955. Perencanaan dan hasil konferensi ini menjadi polemik di masyarakat karena keputusannya bermotif politik. Partai Masyumi melarang simpatisannya menyumbang dan terlibat dalam kegiatan tersebut, bahkan sudah dilarang pada tahap sosialisasi dan penggalangan dana kegiatan.⁶⁵ Pusat RKKS secara terselubung berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia yang berfungsi menjembatani hubungan partai dengan kampung.⁶⁶ Sampai tahun 1956, Pusat RKKS diketuai oleh tokoh PKI yang bernama Mochammad Tam.⁶⁷

Jumlah penduduk yang meningkat dan terkonsentrasi pada kampung-kampung menarik perhatian PKI untuk terlibat di dalamnya. RKKS sebagai organisasi masyarakat memang bukan bagian dari partai mana pun sehingga

⁶¹ *Suara Rakyat*, 5 & 8 Januari 1954. *Perdamaian*, 17 Mei 1955; 7 Oktober 1955.

⁶² *Suara Rakyat*, 5 Januari 1954.

⁶³ *Suara Rakyat*, 7 Januari 1954.

⁶⁴ *Suara Rakyat*, 4 Februari 1954.

⁶⁵ *Java Pos*, 14 Februari 1954.

⁶⁶ James L. Peacock. 2005. *Ritus Modernisasi: Aspek Sosial dan Simbolik Teater Rakyat Indonesia*, terj. Eko Prasetyo. Jakarta: Desantara, hlm. 25.

⁶⁷ *Perdamaian*, 18 Juni 1956.

RKKS bukan bagian PKI, tetapi didekati oleh PKI dianggap bagian PKI. Kedudukan RKKS di masyarakat Kota Surabaya menjadi bagian kehidupan dalam fungsi sosial pada tahun 1950-an, tetapi setelah tahun 1965 organisasi massa ini berangsur-angsur lenyap. Dengan demikian, bentuk solidaritas masyarakat kampung yang identik dengan Kota Surabaya adalah *sinoman* dan Rukun Kampung Kota Surabaya.

* * * * *

REFERENSI

Berita Koran dan Majalah

- Bintang Hindia*, Nomor 1 Tahun II, Nomor 15 Tahun III, 1904.
Bintang Soerabaia, 17 Februari; 27 April; 4, 24, 25 Mei 1904.
Gapura, Volume VIII, Nomor 3, Mei 1975.
Harian Umum, 21 Juli 1953.
Java Pos, 14 Februari 1954.
Java Pos, 5 Mei 1955.
Liberty, Nomor 494, 23 Februari 1963.
Perdamaian, 17 Mei 1955; 7 Oktober 1955.
Perdamaian, 18 Juni 1956.
Pewarta Soerabaia, 6 Mei; 3 Juni 1918.
Pewarta Soerabaia, 9 April; 1, 18 Maret 1921.
Pewarta Soerabaia, 27 Juli; 10, 12 September 1923.
Pewarta Soerabaia, 5 Februari 1932.
Pewarta Soerabaia, 23 Agustus; 12, 19 Oktober 1950.
Pewarta Soerabaia, 11, 16, 18, 21 Juli 1953.
Soeara Asia, 15 September 2602.
Suara Rakjat, 8 Januari 1952.
Suara Rakjat, 25 April; 7 Mei 1951.
Suara Rakyat, 5, 7, 8 Januari; 4 Februari 1954.
Tjerman, Nomor 339, Tahun VIII, 30 Maret 1957.
Trompet Masyarakat, 12 April 1952.

Buku dan Artikel Jurnal

- Abdulgani, R. & Frederick, W.H. 1974. *My Childhood World. Indonesia*, (17).
 Akhadiat. 2008. *Masuk Kampung Keluar Kampung, Surabaya Kilas Balik*. Surabaya: Henk Publica.
 Anonim. 1926. *Masjdjid dan Makam Islam*. Weltevreden: Balai Poestaka.

- Anonim. 1953. *Petundjuk Kota Surabaya*. Surabaya: Pustaka Marfiah.
- Boedhimoerdono. 2003. *Jalan Panjang Menuju Kota Pahlawan*. Surabaya: Pusura.
- Dick, H.W. 2002. *Surabaya: City of Work, A Socioeconomic History, 1900–2000*. Athens: Ohio University Press.
- Von Faber, G.H. 1936. *Nieuw Soerabaia, de geschiedenis van Indie's voornaamste koopstad in de eerste kwarteeuw sedert hare intelling 1906–1931*. Soerabaia: Van Ingen.
- Frederick, W.H. 1989. *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926–1946)*. Jakarta: Gramedia.
- Hutomo, S.S. 1986. Linguistic Folklore: Bahasa Jawa Dialek Surabaya. Dalam *Kesenian, Bahasa, dan Folklor Jawa*. Disunting oleh Soedarsono. Yogyakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kurasawa, A. 1993. *Mobilisasi dan Kontrol, Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa, 1942–1945*. Jakarta: Grasindo.
- Peacock, J.L. 2005. *Ritus Modernisasi: Aspek Sosial dan Simbolik Teater Rakyat Indonesia*. Diterjemahkan oleh Eko Prasetyo, Jakarta: Desantara.
- Pigeaud, Th. 1958. Javanese Gold. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Deel 114, 1/2de Afl.
- Samidi. 2017. Surabaya sebagai Kota Kolonial Modern pada Akhir Abad ke-19: Industri, Transportasi, Permukiman, dan Kemajemukan Masyarakat. *Mozaik Humaniora*, 17(1).
- Smith-Hefner, N.J. 1989. A Social History of Language Change in Highland East Java. *The Journal of Asian Studies*, 48(2).
- Suryadinata, L. 1988. *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Wertheim, W.F. & The Siau, G. 1962. Social Change in Java, 1900–1930. *Pacific Affairs*, 35(3).
- Widgren, Ö. 1997. Social Solidarity and Social Exchange. *Sociology*, 31(4).